

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2022)

Beni kris Andrea Susanto

Akuntansi,Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Indonesia Membangun,Bandung,Indonesia Jl.soekarno Hatta
No.448,Batununggal,Kec,Bandung kidul,Bandung City,West java 40266
Benikrisandrea@student.inaba.ac.id

Kartika Berliani

Manajemen,Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Indonesia Membangun,Bandung,Indonesia Jl.soekarno Hatta
No.448,Batununggal,Kec,Bandung kidul,Bandung City,West java 40266
Kartika.berliani@inaba.ac.id

Article's History:

Received 18 June 2024; Received in revised form 7 July 2024; Accepted 27 July 2024; Published 1 August 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Susanto, B. K. A., Berlian, K. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2022). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (4). 2732-2739.
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2914>

Abstrak :

Penelitian ini menginvestigasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal di kabupaten-kabupaten Provinsi Jawa Barat selama periode 2017-2022. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi panel untuk menguji hubungan antara variabel-variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terbukti berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di kabupaten-kabupaten tersebut. Temuan ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang alokasi sumber pendapatan daerah dan kebijakan fiskal di tingkat regional.

Keywords: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal, Regresi Panel, Jawa Barat

Pendahuluan

Pemerintah daerah di Indonesia, termasuk kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Barat, memiliki kewajiban untuk memastikan efektivitas pengelolaan keuangan publik dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu indikator penting dari pengelolaan keuangan daerah adalah belanja modal, yang merupakan alokasi anggaran untuk investasi dalam infrastruktur dan proyek-proyek pembangunan jangka panjang lainnya.

Dalam konteks ini, sumber-sumber pendapatan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) memainkan peran krusial. PAD merupakan sumber pendapatan utama yang diperoleh langsung oleh pemerintah daerah dari berbagai pajak, retribusi, dan hasil usaha lainnya. Sementara itu, DAU, DAK, dan DBH merupakan transfer dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pemerintahan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur.

Dalam beberapa tahun terakhir, alokasi dan penggunaan sumber-sumber pendapatan daerah ini menjadi sorotan utama dalam diskursus kebijakan publik. Pengaruhnya terhadap belanja modal menjadi fokus penelitian yang relevan untuk memahami sejauh mana kebijakan fiskal daerah dapat mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal di kabupaten-kabupaten Provinsi Jawa Barat selama periode 2017-2022. Provinsi Jawa Barat dipilih karena merupakan salah satu provinsi dengan potensi ekonomi yang besar di Indonesia, serta memiliki ragam tantangan dan potensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan memperdalam pemahaman tentang hubungan antara sumber pendapatan daerah dan alokasi belanja modal, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat kabupaten di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti, praktisi, dan pengambil kebijakan dalam konteks analisis keuangan publik regional.

Melalui penguraian faktor-faktor yang memengaruhi belanja modal di tingkat kabupaten, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika keuangan daerah dan potensi perbaikan dalam pengelolaan sumber daya publik untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Tinjauan Pustaka

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang sah atau asli yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari berbagai sumber, seperti pajak daerah (seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak hotel), retribusi daerah (seperti retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan parkir, dan retribusi izin mendirikan bangunan), hasil usaha daerah (seperti keuntungan dari perusahaan milik daerah), dan sumber pendapatan lain yang sah dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2009), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang sah dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah, baik yang berasal dari penerimaan pajak, retribusi, hasil usaha, atau sumber pendapatan lainnya.

Menurut Arie Sujito (2011), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber pendapatan yang dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha, dan sumber pendapatan lainnya.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah istilah dalam sistem keuangan negara Indonesia yang mengacu pada alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana ini diberikan dalam bentuk transfer keuangan yang bersifat umum dan tidak terikat, yang tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Menurut Agus Harianto (2018), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari transfer keuangan pusat ke daerah yang bersifat umum dan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal.

Pengertian ini menegaskan bahwa DAU tetap merupakan sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat lokal, meskipun regulasi dan mekanisme alokasi dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan fiskal nasional dan kondisi ekonomi daerah.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah istilah yang merujuk pada alokasi dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki tujuan spesifik dan terbatas. DAK diberikan untuk mendukung dan membiayai proyek-proyek atau program-program prioritas nasional yang tidak bisa sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah melalui pendapatan dan dana lain yang mereka miliki.

DAK memiliki peruntukan yang jelas sesuai dengan kebutuhan pembangunan atau pelayanan publik tertentu yang dianggap penting oleh pemerintah pusat, seperti pembangunan infrastruktur kritis, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, atau penanggulangan bencana. Dana ini bersifat tambahan dan biasanya dikelola dengan ketat untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Menurut Bambang Suhamoko S. (2019), Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersifat khusus dan diberikan untuk tujuan tertentu guna mendukung proyek pembangunan atau program prioritas nasional di tingkat daerah.

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sejumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan negara yang dihasilkan dari sumber daya alam atau penerimaan lain yang dikelola bersama oleh pemerintah pusat dan daerah. Dana ini diberikan sebagai kompensasi atau pembagian hasil dari pengelolaan bersama sumber daya nasional, seperti minyak, gas, dan tambang, atau dari pajak tertentu yang disetor oleh daerah tetapi diatur dan didistribusikan kembali oleh pemerintah pusat.

Menurut Heryanto, dkk. (2020), Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari penerimaan negara yang diberikan kepada daerah sebagai kompensasi atau pengganti atas pengelolaan sumber daya alam yang terletak di wilayahnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang direncanakan dan dilakukan oleh suatu entitas untuk memperoleh aset tetap yang memiliki manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Aset tetap tersebut bisa berupa infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, gedung, dan peralatan produktif seperti mesin-mesin atau peralatan teknologi tinggi. Tujuan dari belanja modal adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi operasional, atau kualitas pelayanan yang diberikan.

Menurut Mardiasmo (2020), belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh atau meningkatkan aset tetap yang dapat digunakan dalam jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas produksi atau pelayanan pemerintah.

Metodologi

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat kausalitas yaitu jenis yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa yang akan menyebabkan peristiwa selanjutnya atau dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai hubungan sebab akibat antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hubungan sebab akibat dalam penelitian ini berarti untuk menganalisis pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana data yang digunakan berupa angka dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan penekanan berdasarkan angka dengan menggunakan metode statistik tertentu.

Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang dilandaskan oleh filsafat positifisme dengan tujuannya untuk meneliti suatu populasi dan atau sampel data tertentu dan selanjutnya akan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif fokus dan arah penelitiannya akan lebih menjurus ke arah membangun teori dengan menggunakan data dan fakta yang telah ada, sehingga keadaan di lapangan tidak akan mempengaruhi atau merubah fokus pada penelitian.

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu Teknik sampling jenuh dimana jenis sampling ini menggunakan seluruh populasi menjadi bagian dari sampel sehingga tidak ada sampel yang diambil secara acak . Teknik ini biasanya digunakan ketika populasi yang ingin diteliti memiliki jumlah yang relatif kecil dan mudah dijangkau yang mana cocok untuk penelitian ini yang memiliki populasi sejumlah 4 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Model yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah persamaan regresi linear berganda yaitu Teknik analisis yang digunakan apabila variabel bebas berjumlah lebih dari satu (Agussalim M, 2015:82). Model regresi di dalam penelitian ini dirumuskan dengan persamaan berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 DBH + \varepsilon$$

Keterangan :

BM : Belanja Modal
 β_0 : Konstanta
PAD : Pendapatan Asli Daerah
DAU : Dana Alokasi Umum
DAK : Dana Alokasi Khusus
DBH : Dana Bagi Hasil
 ε : error

Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	24	0.76	1.78	1.0738	0.23019
Dana Alokasi Umum	24	0.99	1.00	0.9988	0.00338
Dana Alokasi Khusus	24	0.87	0.99	0.9337	0.03633
Dana Bagi Hasil	24	0.54	1.26	0.9046	0.18711
Belanja Modal	24	0.69	1.71	1.1742	0.31479
Valid N (listwise)	24				

(Sumber, Diolah SPSS 2024)

Nilai rata-rata variabel pendapatan asli daerah yaitu 1.07 yang artinya rata-rata realisasi pendapatan asli daerah melebihi anggaran yang mana hal ini merupakan hal yang baik karena realisasinya melebihi anggaran yang diharapkan.

Nilai rata-rata variabel dana alokasi umum yaitu 0.99 yang artinya meskipun rata-rata realisasi dana alokasi umum sudah tergolong cukup tinggi, namun hal tersebut belum cukup memenuhi ekspektasi yang diharapkan.

Nilai rata-rata variabel dana alokasi khusus yaitu 0.93 yang artinya meskipun rata-rata realisasi dana alokasi khusus sudah tergolong cukup tinggi, namun hal tersebut belum cukup memenuhi ekspektasi yang diharapkan.

Nilai rata-rata variabel dana bagi hasil yaitu 0.90 yang artinya meskipun rata-rata realisasi dana bagi hasil sudah tergolong cukup tinggi, namun hal tersebut belum cukup memenuhi ekspektasi yang diharapkan.

Nilai rata-rata variabel belanja modal yaitu 1.17 yang artinya rata-rata realisasi belanja modal melebihi anggaran yang mana hal ini merupakan hal yang dikategorikan kurang baik karena realisasinya melebihi anggaran yang ditentukan.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

Coefficients ^a						
Variabel		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.134	0.195		0.686	0.501
	Pendapatan Asli Daerah	0.574	0.263	0.465	2.187	0.041
	Dana Alokasi Umum	0.979	0.363	0.884	2.698	0.014
	Dana Alokasi Khusus	-0.517	0.379	-0.365	-1.362	0.189
	Dana Bagi Hasil	-0.146	0.242	-0.137	-0.604	0.553
	Adjusted R Square				0.684	
	Sig. F Statistik				0.000	

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis penelitian secara parsial pada tabel 2 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hasil Pengujian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parsial, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal yang artinya seiring dengan meningkatnya Pendapatan asli daerah, pemerintah daerah Jawa Barat memiliki lebih banyak sumber daya untuk dialokasikan ke berbagai sektor, termasuk Belanja Modal. Belanja Modal mencakup pengeluaran untuk pembelian barang-barang modal yang berguna untuk pembangunan jangka panjang, seperti infrastruktur, gedung dan fasilitas publik. Pendapatan asli daerah yang tinggi mampu membantu pemerintah daerah untuk dapat merealisasikan lebih banyak proyek pembangunan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Hubungan antara Pendapatan asli daerah dan Belanja Modal ini mencerminkan kemampuan finansial daerah Jawa Barat untuk berinvestasi dalam aset-aset produktif yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Hasil penelitian didukung oleh penelitian Prasetyo & Rusdi (2021) dan Mutiara & Astuti (2020) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah terbukti berpengaruh positif terhadap belanja modal yang artinya ketika pendapatan asli

daerah meningkat, maka hal ini akan meningkatkan belanja modal pada daerah tersebut. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan (H1) diterima.

Hasil Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parsial, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal yang artinya semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang ditransfer atau dialirkan kepada daerah oleh pemerintah pusat, maka semakin tinggi pula potensi kenaikan dana yang akan dialokasikan untuk anggaran belanja modal. Dana Alokasi Umum yang merupakan salah satu komponen dari transfer dana pemerintah pusat ke pemerintah daerah memiliki bertujuan untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan pengeluarannya, termasuk untuk mengurangi ketimpangan antar daerah (Mutiar & Astuti, 2020). Ketika Dana Alokasi Umum yang diterima oleh suatu daerah meningkat, daerah tersebut cenderung memiliki lebih banyak sumber daya finansial untuk dialokasikan ke berbagai sektor, termasuk belanja modal. Karena peningkatan Dana Alokasi Umum berdampak langsung pada belanja modal, pemerintah daerah pada akhirnya akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk merealisasikan proyek-proyek untuk pembangunan daerah.

Peningkatan belanja modal yang didukung oleh kenaikan Dana Alokasi Umum ini tentu akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, belanja modal yang tepat sasaran dapat membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dan mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang tertinggal. Hasil penelitian didukung oleh penelitian Prasetyo & Rusdi (2021), Abbas *et al* (2021) dan Mutiar & Astuti (2020) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum terbukti berpengaruh positif terhadap belanja modal yang artinya ketika Dana Alokasi Umum meningkat, maka hal ini akan meningkatkan belanja modal pada daerah tersebut. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan (H2) diterima.

Hasil Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parsial, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pemerintah daerah yang lebih besar terhadap Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan ketersediaan aset dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus. Pemerintah daerah cenderung mengandalkan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pengadaan aset, baik aset tetap maupun aset lain yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dana Alokasi Khusus biasanya dialokasikan untuk tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga penggunaannya lebih terbatas dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan secara lebih fleksibel oleh pemerintah daerah (Prasetyo & Rusdi, 2021). Oleh karena itu, meskipun Dana Alokasi Khusus bisa membantu dalam beberapa proyek tertentu, pengaruhnya terhadap belanja modal secara keseluruhan cenderung lebih kecil dimana hal ini dicerminkan melalui nilai rata-rata realisasi dana bagi hasil yang hanya mencapai 93% dari anggaran. Hasil penelitian didukung oleh penelitian Prasetyo & Rusdi (2021) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal yang artinya tingkat penerimaan Dana Alokasi Khusus tidak berdampak secara langsung pada realisasi belanja modal pada daerah tersebut. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan (H3) ditolak.

Hasil Pengujian Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parsial, dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan oleh penerimaan Dana Bagi Hasil pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat memiliki kontribusi yang relatif kecil dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata realisasi Dana Bagi Hasil yang hanya mencapai 90% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dana Bagi Hasil adalah dana yang dibagikan oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan penerimaan negara tertentu, seperti pajak dan sumber daya alam, yang berasal dari daerah tersebut. Namun, kenyataannya, nilai realisasi yang lebih

rendah ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil tidak selalu dapat diandalkan sebagai sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah. Rendahnya kontribusi Dana Bagi Hasil ini menyebabkan pengaruhnya terhadap belanja modal menjadi minim. Mengingat pentingnya belanja modal dalam mendukung pembangunan daerah, ketergantungan pada sumber pendanaan yang tidak konsisten seperti Dana Bagi Hasil dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk merencanakan dan merealisasikan proyek-proyek pembangunan yang penting. Hasil penelitian didukung oleh penelitian Abbas *et al* (2021) dan Waskito *et al* (2019) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil terbukti tidak berpengaruh terhadap belanja modal yang artinya tingkat penerimaan Dana Bagi Hasil tidak berdampak secara langsung pada realisasi belanja modal pada daerah tersebut. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan (H4) ditolak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memberikan pemerintah daerah lebih banyak sumber daya untuk dialokasikan ke berbagai sektor pembangunan, termasuk belanja modal. Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih mengandalkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dalam mendukung ketersediaan aset dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut: Meningkatkan Pengelolaan dan Peningkatan PAD:

1. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada, seperti pajak daerah dan retribusi. Hal ini dapat dilakukan melalui strategi pengumpulan yang lebih efisien, peningkatan pelayanan publik, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran pembayaran pajak. Selain itu, inovasi dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata, industri kreatif, dan UMKM, juga dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang signifikan. Langkah-langkah ini, diharapkan PAD dapat meningkat dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap belanja modal daerah.
2. Dana Alokasi Umum perlu digunakan secara lebih strategis dengan prioritas pada proyek-proyek infrastruktur yang memiliki dampak jangka panjang dan luas bagi masyarakat. Perencanaan yang matang dan transparan dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum juga sangat penting untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memaksimalkan manfaat dari Dana Alokasi Umum untuk pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Meskipun Dana Alokasi Khusus memiliki penggunaan yang terbatas, pemerintah daerah harus memastikan bahwa dana ini digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa Dana Alokasi Khusus digunakan dengan tepat dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah. Dengan pengelolaan yang efektif, Dana Alokasi Khusus dapat tetap memberikan kontribusi signifikan meskipun dalam lingkup yang terbatas.
4. Pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan pada Dana Bagi Hasil dengan mencari sumber-sumber pendanaan alternatif. Hal ini bisa termasuk melakukan investasi dari sektor swasta, kemitraan publik-swasta, atau pinjaman daerah yang sesuai dengan kapasitas fiskal. Selain itu, peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang ada juga penting untuk mengurangi risiko ketergantungan pada sumber dana yang tidak konsisten seperti Dana Bagi Hasil. Saran ini diharapkan dapat memberikan stabilitas finansial yang lebih besar dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Saran-saran di atas diharapkan dapat membantu pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Referensi

- Abbas, D. S., Hakim, M. Z., & Novayandi, I. (2021, June). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal. In Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis (pp. 687-692).
- Arie Sujito. (2011). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bambang Suharnoko S. (2019). Pengantar Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Buku Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Harianto, A. (2018). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Prenada Media Group.
- Heryanto, dkk. (2020). Kebijakan Fiskal dan Transfer Keuangan dalam Konteks Otonomi Daerah. Jakarta: Kencana.
- Maulani, I. (2024). Pengaruh Lingkungan Kerja, Beban Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Dentalcare Solution. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10 (3). 2065-2072. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2510>
- Mardiasmo. (2009). Perencanaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2020). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mutiara, A., & Astuti, Y. P. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 1(1), 12-24.
- Prasetyo, D. A., & Rusdi, D. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi, 1(1).
- Priyatno, D. (2017). Akuntansi Sektor Publik: Konsep, Standar, Penerapan, dan Kasus. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Rusherlisyani, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220-238.